

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI (Creative Economy Development Strategy in Sukabumi)

Oleh:

Risma Nurmilah *), Lukyutawati Anggraeni *), Tanti Novianti *)

ABSTRACT

Mapping of creative industries is a crucial basis for assessing the creative economy in regions. Main purpose from this research is to examine the development strategy of creative economy in Sukabumi. The method is Analysis hierarchy process (AHP). Creative Economy Development Strategy plan is start with understand agglomeration and also identify support infrastructure. The result of analysis are founded the same characteristic from each subsector. Collaboration between home industry, government and academic are decision maker for the success development. Which is the main actor is government. Based on the research, there are 7 strategies on creative economy development in Sukabumi, training (0.149), capital access (0.091), online promotion (0.081), standardization of four products with being keep quality (0.069), local market (0.060), mentoring (0.060) and repairing the electrical infrastructure (0.057). make a plan a development creative economy with consistent good coordination, so can increase a regional economic growth.

Keywords: creative economy, strategies, agglomeration, Analysis hierarchy process (AHP).

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Makna kreativitas dapat dilihat sebagai kapasitas atau daya upaya untuk menghasilkan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah. Kreativitas merupakan faktor pendorong munculnya inovasi dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada. Kreativitas tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi dapat juga meningkatkan nilai tambah. Kreativitas dapat berasal dari budaya (Markusen, 2008). Ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena ide dan kreativitas adalah sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui.

Berdasarkan data BPS (2014) pada tahun 2013 sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 641.815,4 miliar. Kontribusi ini menempatkan sektor ekonomi kreatif di peringkat ketujuh dari 10 sektor ekonomi nasional dengan persentase mencapai 7,05 persen, selaras dengan penelitian Emilia (2009), Piergiovanni, et al (2009), Rombouts (2013), Carr (2009) dan Thomas (2005) pengaruh ekonomi kreatif sangat penting terhadap perekonomian. Sektor ekonomi kreatif ini mengalami peningkatan 10,9 persen dari tahun 2012. Pada tahun 2013 sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 641.815,4 miliar. Kontribusi ini menempatkan sektor ekonomi kreatif di peringkat ketujuh dari 10 sektor ekonomi nasional dengan persentase mencapai 7,05 persen. Sektor ekonomi kreatif ini mengalami peningkatan 10,9 persen dari tahun 2012 (Tabel 1).

Tabel 1. PDB Indonesia atas dasar harga

No	Sektor	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	985.470,50	1.091.447,30	1.190.412,40	1.303.177,30
2	Pertambangan dan pengalihan	719.710,10	879.505,40	970.599,60	1.001.485,30
3	Industri pengolahan	1.393.274,40	1.575.291,90	1.720.574,00	1.864.897,10
4	Listrik, gas dan air bersih	49.119,00	56.788,90	65.124,90	72.497,10
5	Konstruksi	660.890,50	754.483,50	860.964,80	965.135,90
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	682.286,80	804.473,30	905.151,50	1.024.379,20
7	Pengangkutan dan komunikasi	417.527,80	484.790,30	541.930,40	631.278,60
8	Keuangan, real estat dan jasa perusahaan	431.980,60	496.171,70	554.218,70	638.092,20
9	Jasa-jasa	633.593,00	752.829,70	854.127,40	965.371,30
10	Ekonomi kreatif	472.999,20	526.999,20	578.760,60	641.815,50
PDB Indonesia		6.446.851,90	7.422.781,20	8.241.864,30	9.109.129,40

Sumber : BPS, 2013

Kontribusi sektor ekonomi kreatif nasional didukung oleh PDRB Provinsi Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,06 persen pada tahun 2013. Di samping itu tahun 2013 sektor industri pengolahan Jawa barat yang di dalamnya terdapat sektor ekonomi kreatif, mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat memberikan sumbangsih yang relatif cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di provinsi Jawa Barat didukung oleh industri setiap daerahnya. Kota

Disamping itu perkembangan industri di Kota Sukabumi terus mengalami peningkatan, yang diimbangi kenaikan investasi dan tenaga kerja setiap tahunnya (Tabel 3). Industri aneka dalam hal ini adalah rata-rata industri kecil menengah yang mencakup ekonomi kreatif memberikan sumbangsih terbesar dalam hal tenaga kerja.

Rata-rata satu usaha dapat menyerap 9 (sembilan) tenaga kerja. Selaras dengan penelitian Bharul, *et al* (2013) mengatakan ekonomi kreatif memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

berlaku tahun 2010-2013 (milyar rupiah) Sukabumi yang merupakan salah satu kota di Jawa Barat, mempunyai peluang yang baik untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Dalam hal ini sector ekonomi kreatif termasuk sector unggulan. Menurut Sambodo (2006) sector unggulan berperan dalam perekonomian daerah.

PDRB kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan kota Sukabumi memberikan kontribusi terhadap PDRB total provinsi Jawa Barat secara signifikan. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2013, PDRB Kota Sukabumi atas harga konstan mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari tahun 2009 ke 2012 (Tabel 2).

Tabel 2. Agregat PDRB, Jumlah Penduduk, dan PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2009-2012 (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012
PDRB atas dasar harga berlaku	4.394.806,62	5.175.324,47	5.921.023,59	6.658.053,32
PDRB atas dasar harga konstan 2000	1.810.150,72	1.920.727,06	2.041.969,74	2.149.891,49
Jumlah penduduk pertengahan tahun	287.856,00	291.569,00	304.044,00	308.508
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	15.267.378,89	17.749.913,31	19.474.233	21.581.460,85
PDRB per kapita atas dasar harga konstan	6.288.389,74	6.587.556	6.716.033,67	6.968.673,40

Sumber : BPS, 2013

di Bangladesh karena biaya tenaga kerja rendah, yang otomatis menyerap tenaga kerja yang tinggi, hal ini menjadi potensi yang sangat besar untuk berkembang. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi dan peranan yang cukup strategis dalam memberikan efek ke depan yang positif. Semakin banyaknya ekonomi kreatif maka lapangan pekerjaan semakin luas dan kesejahteraan masyarakatpun semakin meningkat.

Kontribusi sektor ekonomi kreatif nasional didukung oleh PDRB Provinsi Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,06 persen padatahun 2013. Di

samping itu tahun 2013 sektor industri pengolahan Jawa barat yang di dalamnya terdapat sektor ekonomi kreatif, mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi kreatif di Jawa barat memberikan sumbangsih yang relatif cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawa barat merupakan salah satu provinsi dimana perkembangan ekonomi kreatifnya didukung oleh industri setiap daerahnya. Kota Sukabumi yang merupakan salah satu Kota di Jawa Barat,

mempunyai peluang yang baik untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

PDRB kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan Kota Sukabumi memberikan kontribusi terhadap PDRB total Provinsi Jawa Barat secara signifikan. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2013, PDRB Kota Sukabumi atas harga konstan mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari tahun 2009 ke 2012. Disamping itu perkembangan industri di Kota Sukabumi terus mengalami peningkatan, yang diimbangi kenaikan investasi dan tenaga kerja setiap tahunnya.

Investasi dan Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2010-2013

Tabel 3. Perkembangan Industri Berdasarkan Unit Usaha,

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Industri agro dan hasil hutan				
	unit usaha	1.405	1.486	1.513	1.527
	Investasi	24.287.787.000	25.464.187.000	25.785.187.000	25.951.387.000
	Tenaga kerja	7.183	7.480	7.559	7.606
2	Industri aneka				
	unit usaha	359	397	400	415
	Investasi	5.556.316.000	6.356.516.000	6.384.016.000	6.533.256.000
	Tenaga kerja	3.363	3.506	3.514	3.563
3	Industri logam dan alat transportasi				
	unit usaha	314	328	331	337
	Investasi	13.948.587.000	14.378.387.000	14.473.487.000	14.543.787.000
	Tenaga kerja	2.053	2.102	2.125	2.152

Sumber : Dinas perindustrian, 2014

Perkembangan ekonomi kreatif ini penting untuk dipahami sehingga dapat mempercepat pembangunan wilayah, dimana pengembangan ekonomi kreatif nasional tidak dapat dilepaskan dari peran serta ekonomi kreatif di daerah (Ambardi, 2002). Dalam rangka mengerakkan ekonomi kreatif perlu diciptakan iklim yang baik, infrastruktur yang menunjang dengan berfokus pada pembangunan wilayah yang didukung oleh potensi industry kreatif itu sendiri. Menurut Arsyad (1999) dan Taringan (2005) pembangunan wilayah adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang, hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan bahkan dapat menjadi penentuan

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah (PEMDA), yang pada dasarnya dapat memudahkan penyelenggaraan administrasi dan perumusan kebijakan. Pemerintah daerah dapat pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik. Dengan mensinergikan para aktor yaitu produsen, akademisi dan pemerintah itu sendiri (Etzkowits, Leydesdorff, 1998).

Menurut Garnham (2005) pembangunan suatu wilayah dapat didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif. Dalam upaya melaksanakan strategi pengembangan sektor ekonomi kreatif ini, harus difokuskan dengan menggali potensi dan permasalahan dalam ekonomi kreatif yang outputnya adalah mendapatkan strategi kebijakan yang tepat dalam program pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan daerah dan dapat merubah sistem perekonomian, serta kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik. Dimana ekonomi kreatif ini memiliki potensi dan peranan yang cukup strategis dalam memberikan efek ke depan yang positif, dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selaras penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pavel dan Grebenicek (2012) ekonomi kreatif merupakan dasar penting untuk

menilai potensi ekonomi di daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis potensi terjadinya pemusatan konsentrasi lokasi (*agglomeration*) ekonomi kreatif dan mengidentifikasi infrastruktur penunjang ekonomi kreatif di kota Sukabumi.
2. Menganalisis strategi pengembangan ekonomi kreatif di kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian pertama dilaksanakan pada bulan September-Desember 2013. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi mempunyai 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Pada penelitian awal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif. Penelitian kedua dilakukan pada bulan September-November 2014. Penelitian ini adalah penyebaran kusioner untuk para pakar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari strategi terbaik dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kusioner dan wawancara dengan para pelaku industri kreatif. Data yang diperoleh meliputi kondisi usaha, persepsi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri kreatif. Selain itu digunakan data sekunder untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian berupa data PDRB, perkembangan industri berdasarkan unit usaha, investasi dan tenaga kerja, data infrastruktur ekonomi dan fisik, data jumlah penduduk, usia produktif, dan jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah yang berasal dari badan pusat statistik (BPS) Kota Sukabumi.

Teknik Pengambilan *Sampling*

Untuk mengetahui permasalahan dalam ekonomi kreatif ini dilakukan metode pengambilan *sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Dari jumlah responden sebanyak 250 orang, berdasarkan rumus slovin

jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 153 orang yang terdiri dari para pelaku industri kreatif yaitu industri periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, musik, seni pertunjukkan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan (R&D) dan kuliner. Sedangkan responden pada penelitian kedua terdiri dari 15 orang pakar. Menurut Turban (1992) pakar adalah dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta mengkaji situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah yang akan dihadapi. Dalam penelitian ini pakar yang terlibat adalah yang mengetahui tentang ekonomi kreatif, mengerti masalah pengembangan wilayah, dan memiliki keahlian di bidang ekonomi. Para pakar ini adalah Ketua Kadin, Ketua Hipmi, pengusaha yang sudah berkecimpung selama sepuluh tahun, staf ahli walikota, kepala dinas perindustrian, kepala dinas ekonomi kreatif, dan Ketua LPPM dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *analytic hierarchy process* (AHP). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagian awal gambaran umum mengenai kondisi potensi ekonomi kreatif di kota Sukabumi saat ini, kemudian dengan menggunakan data tabel dan *spider web* akan dijelaskan juga mengenai potensi terjadinya pemusatan konsentrasi lokasi ekonomi kreatif serta mengidentifikasi infrastruktur penunjang ekonomi kreatif dan data potensi ekonomi kreatif di kota Sukabumi. Analisis deskriptif ini juga digunakan dalam menjelaskan hubungan yang terjadi didalamnya dan mencari penjelasan teoritis mengenai fenomena yang terjadi sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan kondisi dilapangan.

Menurut Saaty (1991) *analytic hierarchy process* (AHP) adalah suatu model yang mampu memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan dan

mendefinisikan persoalan dengan cara membuat suatu asumsi masing-masing, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang diinginkan.

Inti dalam analisis AHP adalah pemecahan permasalahan sehingga muncul strategi tertentu. Menurut Craig dan Grant (1996) strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sinergitas antara semua elemen dalam industri menjadi kunci keberhasilan strategi ini, dengan didukung oleh faktor-faktor yang akan menjadi alat penopang maka diharapkan strategi yang direncanakan akan berhasil. Hal ini ditegaskan dengan beberapa penelitian Chen, *et al* (2013), Islam (2013), Lange (2008), Lestari (2013), Zhang, *et al* (2011), dan Yi hsu, *et al* (2012).

Kerangka kerja AHP terdiri dari delapan langkah utama yaitu :

1. Mendefinisikan persoalan ekonomi kreatif yaitu dengan menargetkan tujuan yang jelas, yang didukung oleh kriteria dan elemen-elemen yang menyusun struktur hirarki
 2. Membuat struktur hirarki tersusun dari sasaran utama, sub tujuan, faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi sistem tujuan tersebut.
 3. Membuat matriks perbandingan berpasangan dari bagan diatas yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya.
 4. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak $n \times (n-1)/2$. dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Jumlah penilaian keseluruhan $13 \times (13-1/2) = 78$ penilaian. Hal ini menunjukkan ada 78 penilaian dalam analisis ini. Hasil perbandingan dari masing masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi angka 1. Skala 9 terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty adalah :
 - 1 : kedua elemen sama pentingnya. dua elemen memiliki pengaruh yang sama besar
 - 3 : elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya.
 - 5 : elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
 - 7 : satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek
 - 9 : satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya. bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
- 2.4.6.8 : nilai nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan yang berdekatan. nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara 2 pilihan kebalikan (jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j. maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i)
5. Memasukan nilai-nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang diagonal utama. Pengisian matriks banding berpasangan hanya dilakukan pada bagian diatas garis diagonal. contohnya bila F11 memiliki nilai 2 maka nilai variabel F21 adalah $\frac{1}{2}$
 6. Melaksanakan langkah 3,4, dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hirarki tersebut. Ada dua macam matriks pembanding dalam AHP yaitu Matriks Pendapat Individu (MPI) dan

Matriks Pendapat Gabungan (MPG). MPI adalah matriks hasil perbandingan yang dilakukan individu. Hasil ini merupakan pendapat pakar mengenai pengembangan ekonomi kreatif secara personal. variabel disimbolkan sebagai a_{ij} artinya variabel matriks baris ke i dengan kolom ke j (Tabel 4).

Tabel 4. Matriks Pendapat Individu (MPI)

G	A ₁	A ₂	A ₃	A _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a _{2n}
.....
A _n	a _{n1}	a _{n2}	a _{n3}	a _{nm}

Sedangkan MGP adalah matriks baru yang berasal dari rata-rata geometrik pendapat-pendapat para pakar mengenai pengembangan ekonomi kreatif ini, yang rasio inkonsistennya lebih kecil atau sama dengan 10%. yang artinya nilai mutu yang diperoleh baik dan konsisten. Matriks gabungan ini disimbolkan sebagai g_{ij} (Tabel 5). Rumus untuk mencari rata-rata geometrik adalah:

$$g_{ij} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^m a_{ijk}}$$

Keterangan :

G_{ij} : elemen MPG baris ke i kolom ke j

$(a_{ij})_k$: elemen baris ke i dari MPI ke k

m : jumlah MPI yang memenuhi persyaratan

$\prod_{k=1}^m$: perkalian dari elemen ke 1 sampai ke m

Tabel 5. Matriks Pendapat Gabungan (MPG)

G	G ₁	G ₂	G ₃	G _n
G ₁	g ₁₁	g ₁₂	g ₁₃	g _{1n}
G ₂	g ₂₁	g ₂₂	g ₂₃	g _{2n}
.....
G _n	g _{n1}	g _{n2}	g _{n3}	g _{nm}

7. Mensistensis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor-vektor prioritas. Pengolahan matriks pendapat terdiri dari dua tahap yaitu pengolahan horizontal dan pengolahan vertikal.

Keduanya dapat digunakan untuk MPI ataupun MPG. pengolahan horizontal yaitu terdiri dari penentuan vektor prioritas. Uji konsistensi dan revisi pendapat jika diperlukan. Tahapan perhitungan dalam pengolahan horizontal adalah :

- a. Pengolahan Horizontal; Pengolahan baris (Z_i) menggunakan rumus :

$$Z_{ij} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_{ijk}}$$

Dimana:

Z_{ij} = unsur pendapat gabungan

$i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

n = jumlah unsur

- b. Pengolahan vertikal

Pengolahan vertikal adalah perbandingan kepentingan antar unsur dalam satu level. Bila C_{vij} didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh unsur ke j pada tingkat ke i terhadap sasaran utama. maka :

$$C_{vij} = \sum C_{hij(t,i-j)} \times VW_{(t,i-1)}$$

Dimana :

$C_{hij(t,i-j)}$ = nilai prioritas yang ke i terhadap unsur ke t pada tingkat diatasnya ($i=1$) yang diperoleh dari hasil pengolahan horozontal

$VW_{(t,i-1)}$ = nilai prioritas pengaruh unsur ke t pada tingkat ke ($i-t$) terhadap sasaran utama. yang diperoleh dari hasil pengolahan horizontal

- 8. Evaluasi inkonsistensi

Pada pengisian judgement pada tahap matriks banding berpasangan (MBP) terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan unsur yang satu dengan unsur yang lain. sehingga diperlukan suatu uji konsistensi. Dalam AHP penyimpangan ditolerans dengan rasio inkonsistensi dibawah 10%.

Langkah ini dilakukan dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas-prioritas kriteria yang bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak. yang sesuai

dengan dimensi masing masing matriks. Untuk memperoleh hasil yang baik, rasio inkonsistensi harus bernilai kurang dari atau sama dengan 10%. Jika rasio inkonsistensi mempunyai nilai yang lebih besar dari 10%, maka nilai mutu informasi harus ditinjau kembali dan diperbaiki antara lain dengan memperbaiki cara penggunaan pertanyaan ketika melakukan pegisian ulang kuisisioner dan dengan mengarahkan responden yang mengisi kuisisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Pemerintah Hindia Belanda membangun Kota Sukabumi sebagai *Burgerlijk Bestuur* atau administrasi sipil (1914) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada bangsa Belanda dan Eropa, yang mana merupakan pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Setelah Indonesia merdeka maka dibentuk sistem pemerintahan daerah yang mana Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori Kota kecil yang disebut sebagai Kota Prajadian dengan luas areal 1.215 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan.

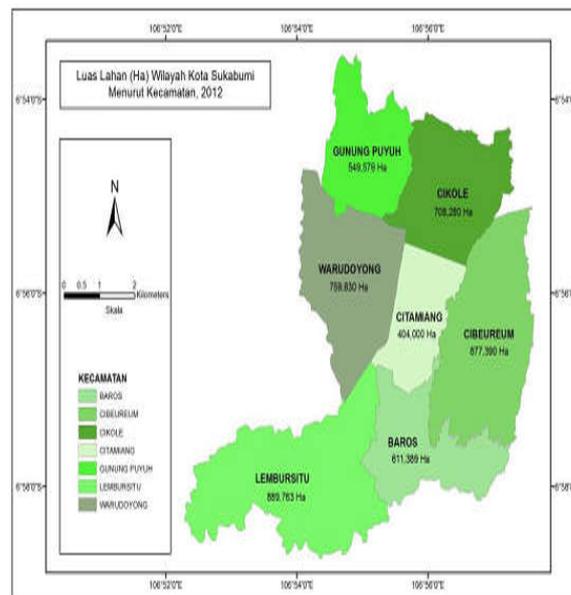
Gambar 1. Kota Sukabumi menurut Kecamatan, 2012

Kota Sukabumi berada pada posisi strategis karena berada diantara Jabodetabek dan Bandung. Kota Sukabumi termasuk 8 kawasan andalan di Jawa Barat yang berpotensi untuk mengembangkan agribisnis dan pariwisata

Berdasarkan visi Kota Sukabumi yang ingin mewujudkan sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat yang berlandaskan iman dan takwa, maka terus dikembangkan, pertumbuhan kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Kecamatan Lembursitu sebagai wilayah yang terluas (889,763 Ha) atau sebesar 19 % dari total wilayah Kota Sukabumi. Sedangkan Kecamatan Citamiang sebagai wilayah terkecil

Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 sehingga terjadi penambahan kecamatan yang kemudian diperluas menjadi 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibereum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 Kelurahan (Gambar 1).

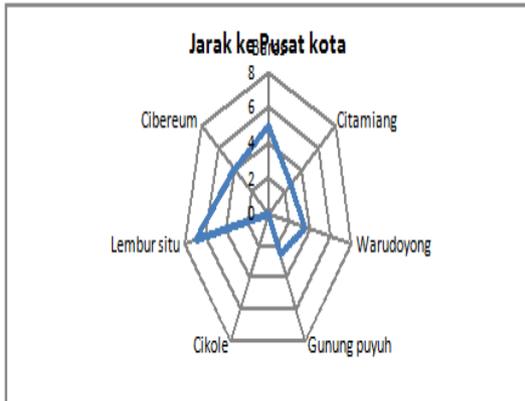


(404,000 Ha). Dengan kata lain Kecamatan Citamiang hanya memiliki luas 8 % dari total wilayah Kota Sukabumi.

Jarak setiap Kecamatan ke pusat Kota Sukabumi tidak terlalu jauh. Kecamatan Cikole mempunyai jarak terdekat dengan pusat pemerintahan (balai kota), hal ini dikarenakan balai kota terletak di Kecamatan Cikole. Kecamatan Citamiang dan Gunung Puyuh berturut-turut 2,67 km dan 2,6 km, jarak ke dua Kecamatan ini mempunyai jarak yang terdekat dengan pusat pemerintahan. Kecamatan Warudoyong mempunyai jarak 3,5 km sedangkan Kecamatan Cibereum 4 km dan Kecamatan Baros 5 km. Jarak terjauh dengan pusat pemerintahan adalah Lembur Situ mencapai 7 km.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas yang terpusat di Kecamatan Cikole. Jarak Setiap

Kecamatan ke pusat kota dapat dilihat pada Gambar 2. Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan jarak yang tidak jauh dari pusat kota akan memudahkan orang untuk



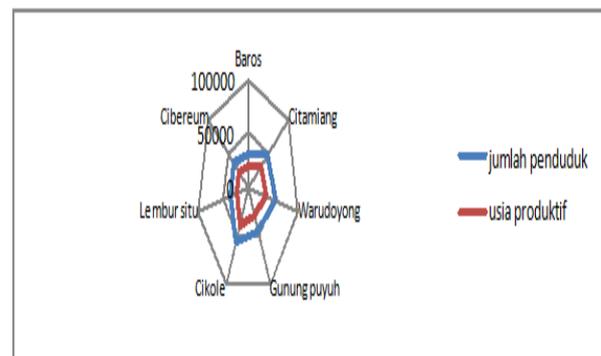
Dalam menunjang pembangunan ini, peranan penduduk sebagai subjek maupun objek pembangunan sangat penting. Sebagai subjek, penduduk sebagai motor penggerak pembangunan karena fungsinya sebagai penghasil sumber daya manusia yang produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah seharusnya diikuti dengan pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan serta pengangguran di Kota Sukabumi jumlah usia produktif mencapai lebih dari 50 persen (Gambar 3). Hal ini menunjukkan peranan penduduk dalam usia produktif menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan fasilitas kesehatan di Kota

Pada setiap kecamatan terdapat 1 puskesmas dan 2-5 puskesmas pembantu/puskesmas keliling. Fasilitas tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara,

melakukan aktivitasnya. Karena itu, ketersediaan infrastruktur terutama kualitas jalan yang baik, sangat diperlukan untuk kelancaran proses produksi.

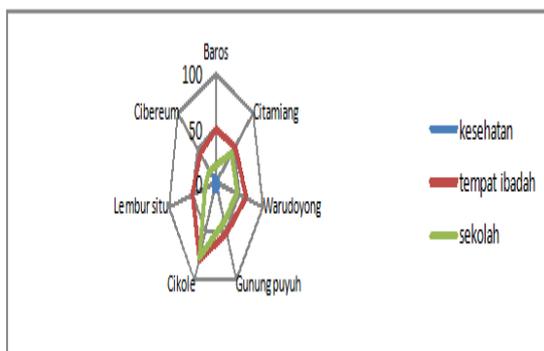
Gambar 2. Jarak Setiap Kecamatan Ke Pusat Kota, 2013.

Sukabumi tergolong rendah, hanya, dengan adanya puskesmas dan puskesmas pembantuyang tersebar pada semua kecamatan di kota Sukabumi.



Gambar 3. Perbandingan jumlah penduduk dan Usia produktif tahun 2013.

dll sangat tinggi dapat dilihat pada Gambar 4. Hal ini menunjukkan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang aktifitas beribadah masyarakat.



Gambar 4. Fasilitas kesehatan, pendidikan dan tempat beribadah di Kota Sukabumi, 2013

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang penting untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas individu, karena kualitas seseorang sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pada saat ini di Kota Sukabumi terdapat 59 Taman Kanak-Kanak, 123 Sekolah Dasar, 35 SLTP, 16 SMU, dan 29 SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta. Sementara itu murid yang tertampung di TK pada tahun 2011/2012 sebanyak 3.081 siswa, murid SD sebanyak 35.682 siswa, murid SLTP negeri sebanyak 11.217 siswa, murid SLTP swasta sebanyak 3.037 siswa, murid SMU negeri dan swasta sebanyak 7.891 siswa dan sebanyak 10.384 murid SMK negeri dan swasta.

Dengan kondisi pendidikan ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ekonomi kreatif, karena pada dasarnya ekonomi kreatif harus didukung oleh tingkat pendidikan dan berasal dari ide manusia yang selalu terbarukan. Berbeda dengan industri yang bermodalkan bahan baku fisik, ekonomi kreatif bermodalkan ide kreatif, talenta dan keterampilan. Hal ini akan membuka akses terutama untuk perusahaan kecil dengan modal terbatas namun mempunyai informasi dan kecerdasan serta ide.

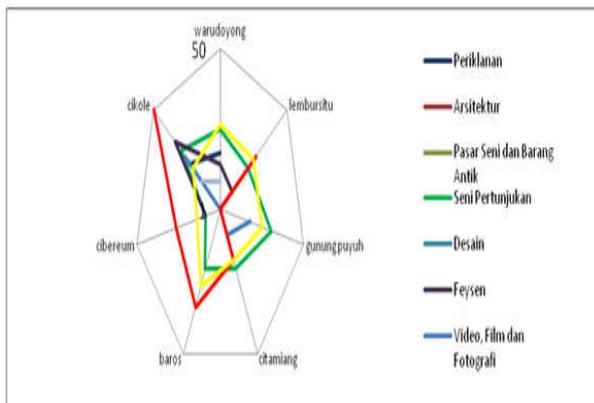
Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada. Pembangunan ini membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad; 1999).

Menurut McDonald (1997), Montgomery(1998), danKoncoro (2002) potensi ekonomi ini menyebabkan adanya konsentrasi lokasi yang dilakukan oleh suatu industri, sehingga bagi masyarakat akan memperoleh keuntungan apabila membuka usaha disekitar lokasi tersebut. Dengan adanya pemusatan konsentrasi industri ini dapat meminimalisir biaya transportasi, informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Sukabumi terkonsentrasi pada industri kuliner, industri fesyen, industri seni pertunjukan dan industri kerajinan (Gambar 5) dengan konsentrasi lokasi terjadi hampir 41% di Kecamatan Cikole. Konsentrasi lokasi ini terjadi karena para pelaku industri kreatif berupaya mendapatkan penghematan lokasi, penurunan biaya transaksi dan penurunan variabilitas akibat keragaman aktivitas ekonomi. Menurut Tarigan (2005) perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.



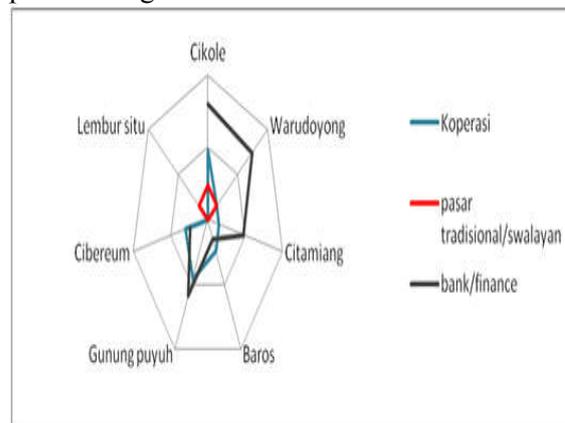
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu bagi keberlangsungan industri kreatif ini, karena biaya distribusi faktor input dan output sangat tergantung pada infrastruktur yang ada. Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai strategi kebijakan yaitu memanfaatkan fasilitas publik yang sudah tersedia secara optimal, dan membangun fasilitas baru, dengan hasil yang diharapkan dalam bentuk fasilitas publik yang representatif yang dapat digunakan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif. Berdasarkan hasil penelitian Kecamatan Cikole memiliki lebih dari 50 % ketersediaan infrastruktur ekonomi yaitu koperasi, lembaga keuangan dan pasar, yang mana hal ini sangat penting dalam

Kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan industri terus meningkat, tetapi rasio elektrifikasi baru mencapai 80 persen yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Cikole. Daya terpasang yang dimiliki PT PLN Area Sukabumi hanya berkapasitas 149.109.640 VA dengan energi yang terjual sebesar 235.464.659 Kwh. Hal ini mengakibatkan sering terganggunya aliran listrik yang disalurkan ke industri maupun ke masyarakat. Di samping itu, penyaluran air bersih di Kota Sukabumi pada tahun 2013 sebanyak 4.056.610. m3. Secara rata-rata penyaluran air bersih per bulan ke rumah tangga sangat rendah yaitu 15,71 m3/bulan, sedangkan untuk pelanggan kategori sosial rata-rata

Gambar 5. Potensi ekonomi sektor unggulan industri kreatif Kota Sukabumi

menunjang industri kreatif yang berdaya saing tinggi (Gambar 6)

Selain itu infrastruktur fisik yang meliputi energi listrik, air bersih dan komunikasi sangat penting bagi perkembangan industri kreatif.



Gambar 6. Perbandingan infrastruktur ekonomi antar Kecamatan di Kota Sukabumi

penyaluran air mencapai 37,76 m3/bulan. Padahal industri kreatif ini hampir rata-rata industri rumahan.

Infrastruktur lainnya yang mendukung jalur komunikasi yaitu kondisi logistik kota Sukabumi. Panjang jalan di Kota Sukabumi tahun 2013 tercatat 168,4 km, dengan 133,25 km merupakan wewenang Pemerintah Kota Sukabumi. Di tahun 2013 hanya 64,9 persen jalan dengan kondisi baik dengan sebagian besar berada di Kecamatan Cikole dengan sisanya berkondisi rusak atau hanya bisa dilewati oleh kendaraan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam yang berada di Kecamatan Lembur situ. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang tinggi karena kapasitas

jangkauan sarana dan prasarana transportasi rendah

Permasalahan Ekonomi Kreatif di Kota Sukabumi

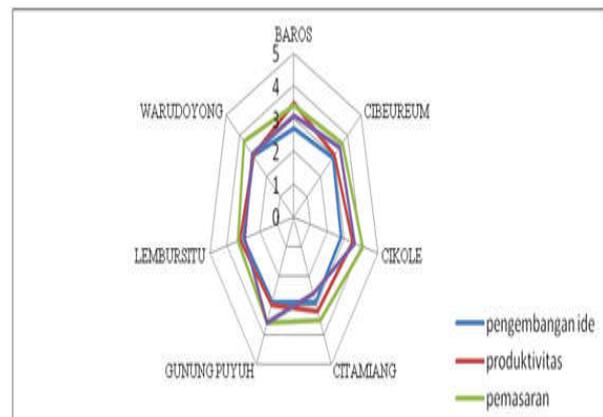
Ekonomi kreatif di Kota Sukabumi memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terhambat berbagai macam permasalahan yang harus segera diatasi. Dalam penelitian ini permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif meliputi empat permasalahan pokok yaitu (1) tidak bisa mengembangkan ide dan kreativitas, (2) ketidapahaman dalam melakukan promosi, (3) jumlah produksi yang tidak mengalami peningkatan, dan (4) pemasaran yang tidak berkembang (Gambar 7).

Berdasarkan penelitian hampir semua potensi mengalami kesulitan dalam pengembangan ide dan kreativitas. permasalahan ini sangat fatal bagi kelangsungan industri yang dijalankan. Dari empat sektor unggulan industri kreatif, yang sangat rendah dalam pengembangan ide dan kreativitas adalah industri kerajinan dan industri kuliner yang terkonsentrasi di Kecamatan Baros dan Kecamatan Cikole. Masalah yang dihadapi dalam industri ini adalah kurang dapat mengeksplorasi ide yang muncul, sehingga ide tersebut hanya sebatas angan-angan. Padahal jika dapat mengembangkan ide dan kreativitas maka dapat melakukan inovasi dan diversifikasi pada produk yang dihasilkan, sehingga produk memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu para pelaku industri kreatif masih belum menyadari pentingnya HaKI. Semua industri kreatif yang ada di Kota Sukabumi tidak mempunyai HaKI, dan menganggap tidak terlalu pentingnya HaKI. Padahal jika tidak mempunyai HaKI menyebabkan produk yang dihasilkan mudah

Permasalahan terakhir adalah pemasaran pada industri kuliner di Kecamatan Lembur situ dan industri kerajinan di Kecamatan Baros. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan

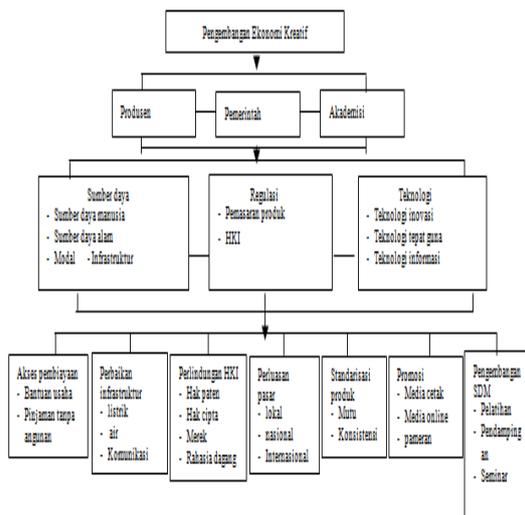
ditiru. Ketidapahaman dalam melakukan promosi juga menjadi permasalahan besar. Promosi yang paling rendah pada industri seni pertunjukan di Kecamatan Citamiang dan industri kuliner di Kecamatan Lembur Situ. Promosi yang selama ini terjadi hanya dari mulut ke mulut sehingga tidak bisa meningkatkan penjualan secara signifikan.

Tingkat produktivitas yang rendah juga menjadi kendala dalam pengembangan industri kreatif ini. Produktivitas terendah ada pada industri kuliner di Kecamatan Cibereum, industri seni pertunjukan di Kecamatan Gunung puyuh dan industri kerajinan di Kecamatan Warudoyong. Permasalahan yang dihadapi dalam produktivitas ini adalah tingkat standarisasi produk yang rendah, sehingga menjadikan produk industri kreatif tidak berkembang. Selain itu hampir 80% sektor industri kreatif ini sulit mendapatkan akses pembiayaan ini dihadapi juga oleh hampir semua subsektor. Para pelaku industri kreatif hampir rata-rata tidak memiliki angunan. Hal ini yang mengakibatkan pembiayaan bagi industri kreatif masih terbatas.



Gambar 7. Permasalahan yang dihadapi ekonomi kreatif di Kota Sukabumi

infrastruktur yang kurang memadai, baik infrastruktur ekonomi maupun fisik. Selain itu kepercayaan serta pengakuan pasar lokal maupun global terhadap industri kreatif masih sangat rendah, yang menyebabkan produk kreatif lokal ini kurang diminati.



Gambar 8. Strategi pengembangan ekonomi kreatif

Strategi Pengembangan ekonomi kreatif Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan software *expert choice 2000*, harus ada sinergitas antara aktor dalam ekonomi kreatif yaitu produsen, pemerintah dan akademisi. Selaras dengan penelitian Leydesdorff (2000) dimana produsen, pemerintah dan akademisi merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, dan ilmu pengetahuan yang vital bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Pemerintah sebagai aktor utamanya dengan nilai eigen 0,562, harus dapat mengimplementasikan dan melakukan komitmen agar program ekonomi kreatif ini dapat direalisasikan dan dilakukan aksi pengembangannya (Tabel 6). Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu pengetahuan berujung pada inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi.

Tabel 6. Aktor pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi

No	Aktor	Nilai Eign
1	Produsen	0,286
2	Pemerintah	0,562
3	Akademisi	0,153

Inconsistency = 0,04 with 0 missing judgments

Dalam pengembangan ekonomi kreatif ini, ada beberapa faktor krusial yang mana harus bersinergi dengan para pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan pendapat

para pakar, dari tiga faktor antara sumberdaya, regulasi dan teknologi. Faktor yang paling berpengaruh adalah sumber daya yang mempunyai nilai eigen 0,497 dengansub faktor sumber daya manusia sebesar0,589. Faktor regulasi juga mempunyai peranan yang penting, dengan sub faktor pemasaran yang mempunyai nilai eigen 0,722. Selain itu teknologi dengan sub faktor inovasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dengan nilai eigen 0,580 (Tabel 7).

Aktor dan faktor ini merupakan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan di wilayah Kota Sukabumi. Karena dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif ini, maka dapat meningkatkan daya saing global. Lingkungan kondusif harus didukung oleh aktor dan faktor yang mana bisa menjadi penunjang, tidak hanya menyangkut regulasi yang melingkupi aktivitas kreatif, tetapi lebih dari itu yang menyangkut akses pendanaan, dukungan infrastruktur, teknologi, perlindungan HaKI dan juga partisipasi aktif dan konstruktif serta apresiasi masyarakat terhadap karya kreatif Kota Sukabumi. Walaupun faktor lainnya mempunyai nilai eigen yang lebih kecil, tetapi hal ini sangat berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan industri kreatif di Kota Sukabumi.

Tabel 7. Faktor pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi

No	Faktor	Nilai eigen	Sub faktor	Nilai eigen	Inconsistency
1	Sumber daya	0,497	Sumber daya manusia	0,589	0,02
			Sumber daya alam	0,131	
			Modal	0,162	
			Infrastruktur	0,118	
2	Regulasi	0,360	Pemasaran	0,722	0,00
			Perlindungan HKI	0,278	
			Inovasi	0,580	
3	Teknologi	0,153	Tepat guna	0,187	0,01
			Informasi	0,233	

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 9), ada 7 strategi utama yang muncul dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu memberikan pelatihan sebesar 0,149, memberikan bantuan usaha sebesar 0,091, membantu promosi dengan media online sebesar 0,081, standarisasi produk dengan menjaga kualitas sebesar 0,069, perluasan pasar dengan target utama adalah pasar lokal sebesar 0,060, memberikan pendampingan sebesar 0,060, dan memperbaiki infrastruktur listrik sebesar 0,057.

Strategi ini dapat berjalan dengan baik dengan faktor pendukung utamanya yaitu sumber daya manusia. Dalam pengembangan strategi ini dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, agar dapat menciptakan inovasi dan mengembangkan ekonomi kreatif yang kokoh serta berkesinambungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

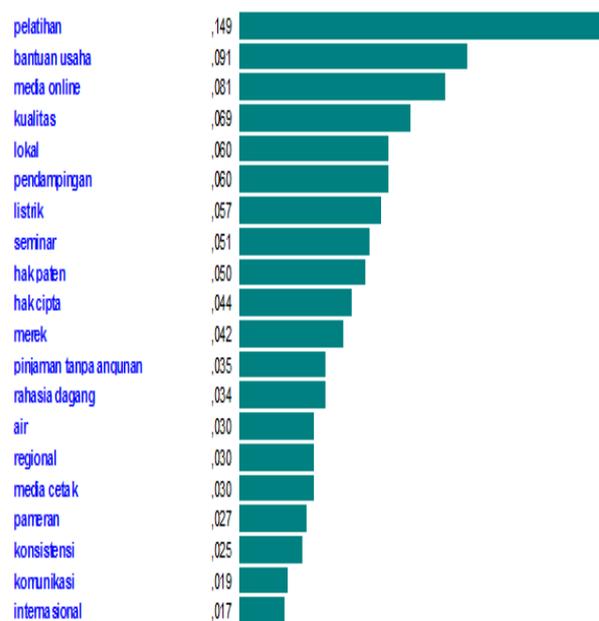
Berdasarkan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi di dalam RKPD 2014 dan RPJM 2013-2018, program untuk mengembangkan ekonomi kreatif masih belum memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif di Kota Sukabumi. Program ini meliputi pembentukan forum komunitas, membuat kodifikasi kekayaan kearifan lokal, membuat kegiatan ajang pemberian penghargaan bagi insan kreatif, dan terwujudnya kampung kreatif.

Padahal permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif masih di hulu. Hal ini kurang sejalan dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Synthesis with respect to:

Goal: pengembangan ekonomi kreatif

Overall Inconsistency = ,03



Gambar 9. Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi

Dalam pengembangan ide industri kuliner di Kecamatan Cikole dan industri kerajinan di kecamatan Baros, strategi yang harus dilakukan adalah dengan diberikan pelatihan dan pmdampingan. Pelatihan ini dapat berupabagaimana menciptakan ide baru, melakukan inovasi, pengembangan produk secara kontinue dan pelatihan manajerial. Agar pelatihan sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan pendampingan untuk memonitoring sejauh mana pelatihan ini dapat berpengaruh terhadap industri kreatif ini. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan kreatif serta mampu membuat produk unggulan yang berdaya saing tinggi.

Promosi menjadi kendala pada industri Seni pertunjukan di kecamatan Citamiang dan industri kuliner di Kecamatan Lembur Situ. Strategi yang tepat dalam pengembangan industri kreatif di Kecamatan ini adalah dengan

memberikan bantuan berupa promosi online. Dengan bantuan pemanfaatan teknologi, promosi menggunakan media online akan lebih cepat membumikan seni pertunjukan dan kuliner secara global.

Strategi yang tepat untuk pengembangan produktivitas pada industri kuliner di Kecamatan Cibereum, industri kerajinan di Kecamatan Warudoyong, dan industri seni pertunjukan di Kecamatan Gunung puyuh yaitu dengan cara menjaga standarisasi produk dan diberikan akses permodalan untuk pengembangan usahanya. Standarisasi produk ini penting dengan menjaga kualitas produk sehingga produk bisa mempunyai daya saing yang tinggi. Selain itu agar produktivitas dapat terus berjalan dibutuhkan akses permodalan dengan memberikan bantuan usaha dapat berupa insentif atau kredit usaha.

Permasalahan jarak yang cukup jauh dengan pusat kota menjadikan industri kuliner di Kecamatan Lembur situ dan industri kerajinan di Kecamatan Baros mempunyai kendala dalam pemasaran. Strategi yang tepat untuk pengembangan industri di Kecamatan ini dengan penguatan pasar lokal, hal ini dapat dilakukan dengan cara optimalisasi pasar dan perbaikan infrastruktur listrik dengan cara menambah pasokan energi listrik ke setiap Kecamatan yang membutuhkan.

Dengan berfokus pada tujuh strategi utama yang dihasilkan maka dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif di setiap Kecamatan di kota Sukabumi. Dengan adanya strategi ini maka diharapkan tujuan dengan membangun wilayah dan mengembangkan ekonomi kreatif secara berkesinambungan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

*) Alumni Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Simpulan

Potensi sektor unggulan ekonomi kreatif berdasarkan Kecamatan terkonsentrasi di empat sektor yaitu kuliner, fesyen, kerajinan, dan seni pertunjukan yang mana terkonsentrasi di Kecamatan Cikole sebesar 41%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Cikole hampir menguasai setengah dari potensi ekonomikreatif yang ada. Faktor penunjang infrastruktur ekonomi dan fisik berada di kecamatan Cikole sekitar 50 persen. Fasilitas ini sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, dengan semakin banyak fasilitas ekonomi yang tersedia maka kecamatan tersebut akan mempunyai daya saing yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ada tujuh strategi utama yang muncul untuk dikembangkan yaitu memberikan pelatihan (0,149), memberikan bantuan usaha (0,09), membantu promosi dengan media online (0,081) standarisasi produk dengan menjaga kualitas (0,069), perluasan pasar dengan target utama adalah pasar lokal (0,060), memberikan pendampingan (0,060), dan memperbaiki infrastruktur listrik (0,057). Dengan memantapkan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan akan tercapai daya saing yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya, teknologi serta diperkuat oleh regulasi untuk menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembangan industri kreatif lokal.

Saran

Pemerintah sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi harus mendorong sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan bagi para pelaku industri kreatif agar dapat menciptakan insan yang kreatif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan market riset secara periodik untuk mengetahui perkembangan industri kreatif dan memodifikasi metode AHP dengan metode lain yang dapat melengkapi seperti SWOT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW BPPT). Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Balai Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Carr, Julie. 2009. Creative Industries, Creative Workers And The Creative Economy: A Review Of Selected Recent Literature. Scottish Government Social Research. Scotland.
- Chen, Chien Hsun and Shing Sheng Guan. 2013. Investigating the weights of service design indicators : an education case study regarding creative lifestyle industry service innovation. Taiwan.
- Emilia, Titan, Voineagu Vergil, dan Todose Monica .2009. The impact of cultural-creative industries on the Economic growth – a quantitative approach. Department of Statistics and Econometrics, Bucharest.
- Etzkowitz, H., Leydesdorff. L., 1998. The endless transition: a “Triple Helix” of university-industry-government relations, Introduction to a theme issue. Minerva. Netherlands.
- Garnham, Nicholas. 2005. From Cultural To Creative Industries : An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom. International Journal of Cultural Policy. Vol. 11. No. 1. ISSN 1028-6632. P 16-23.
- Grant, Robbert M. dan Craig, James C. 1996. Strategic Management. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Islam, Bharul, et al 2013. Prospects and Challenges of the Animation Industry in Bangladesh. International Journal of Computer Graphics & Animation (IJCGA) Vol.3, No.3, July 2013. P 13-20
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. Ekonomika aglomerasi dinamika dan dimensi spasial kluster industri indonesia. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Lange, Bastian. et al. 2008. Berlin’s Creative Industries: Governing Creativity?. journal Industry and Innovation. Vol. 15. No. 5. October 2008. Berlin. Germany. 531–548
- Lestari, R A dan Santoso, E B. 2013. Tipologi lokasi ekonomi kreatif pada subsektor kerajinan di kota Surabaya. Jurnal teknik POMITS vol 1, no 1.1-4. Surabaya
- Leydesdorff, Loet 2000. The triple helix: an evolutionary model of innovations. Research policy. Netherlands.
- Markusen, Ann .et al. 2008. Defining the Creative Economy: Industry and Occupational Approaches. Forthcoming in Economic Development Quarterly.
- McDonald, John F. 1997. Fundamentals of urban economics. New jersey: Prentice Hall.
- Montgomery, M.R. 1998. How large is too large? Implication of the city size literature for population policy and research. Economic development and cultural change.
- Pavel, Bednář and Grebeníček Pavel. 2012. Mapping Creative Industries in the Zlin Region. Journal of Competitiveness. Vol. 4. Issue 1. pp. 20-35.
- Piergiovanni Roberta, Martin Carree, dan Enrico Santarelli. 2009. Creative Industries. New Business Formation and Regional Economic Growth. journal the jena economic research papers. ISSN 1864-7057. Germany. p 1-23.
- Rombouts, Anton. 2013. Opinion of the Committee of the Regions on ‘Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs. Official Journal of the European Union. The Committee Of The Regions. in the EU. P 7-11.
- Saaty, T.L.. 1991. Decision macing leaders : the analytical hierarchy process for decisions in complex world. Jakarta : pustaka binaman pressindo.
- Sambodo, M. T. 2002. Analisis Sektor Unggulan Di Kalimantan Barat. Jurnal ekonomi dan Pembangunan. X : 33.
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

- Thomas M. Menino, Mayor. 2005. Boston Creative Economy. BRA Research Division. Boston.
- Turban, E. 1992. Expert System and Applied Artificial Intelligence. Macmillan: Publishing Company. New York
- Yi Hsu, Chen, Che Chen Huang dan Ti Ming Chang. 2012. Study on Critical Success Factors of the Cultural and Creative Industries of Taiwan's County and City Governments: An Application of AHP. The Journal of International Management Studies. Volume 7 Number 1. Taiwan. P 183-190.
- Zhang, Jiapeng and Kloudova Jitka. 2011. Factors which influence the growth of creative industrie : cross section analysis. Creative and Knowledge Society/International Scientific Journal. P 5-11.